

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)  
MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO  
DI BRI SYARIAH KCP LAMONGAN**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**LISA AMALIA**

**NIM: G94214145**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
SURABAYA  
2018**

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)  
MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO  
DI BRI SYARIAH KCP LAMONGAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Skripsi Program Sarjana Strata Satu  
Ekonomi Syariah**

**Oleh:**

**LISA AMALIA  
NIM. G94214145**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
SURABAYA**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Lisa Amalia

NIM : G94214145

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)  
Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro di  
BRI Syariah KCP Lamongan

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Maret 2018

Saya yang menyatakan,



Lisa Amalia

NIM. G94214145

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lisa Amalia NIM. G94214145 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasakan.

Surabaya, 19 Maret 2018

Pembimbing,



Hj. Nurlailah, SE., MM.

---

NIP. 196205222000032001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lisa Amalia NIM. G94214145 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 4 April 2018. Hasil skripsi dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Hj. Nurlailah, SE., MM.  
NIP. 196205222000032001

Penguji II



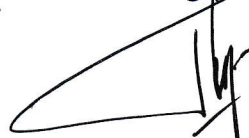
Abdul Hakim, MEI.  
NIP. 197008042005011003

Penguji III



Lilik Rahmawati, MEI.  
NIP. 198106062009012008

Penguji IV



Hanafi Adi Putranto, SE., M.Si.  
NIP. 198209052015031002

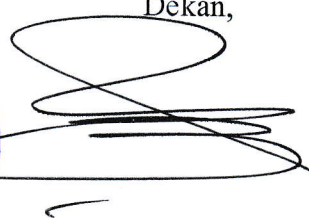
Surabaya, 4 April 2018

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D.  
NIP. 197402091998031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LISA AMALIA  
NIM : G94214145  
Fakultas/Jurusan : FEBI/ EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : [lisamaliaa@gmail.com](mailto:lisamaliaa@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO

SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI BRI SYARIAH

KCP LAMONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 April 2018

Penulis

(LISA AMALIA)

*nama terang dan tanda tangan*



## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus pada BRI Syariah KCP Lamongan)” bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan dan bagaimana peran Pembiayaan KUR Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari metode penelitian ini diperoleh informan yang terdiri dari para pegawai BRI Syariah KCP Lamongan yang terlibat dalam pelaksanaan Pembiayaan KUR Mikro Syariah serta beberapa nasabah Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan berjalan dengan baik dan tidak ditemukan adanya pembiayaan macet. Prosedur Pembiayaan KUR Mikro Syariah Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: tahap pengajuan pembiayaan, tahap BI *Checking*, tahap survei, tahap analisis pembiayaan, tahap pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan/akad pembiayaan, tahap *monitoring*, disertai pertimbangan kaidah syariah. Pembiayaan KUR Mikro Syariah berperan membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, omzet usaha meningkat, serta dapat mengembangkan usaha nasabah lebih dari satu jenis.

Dalam rangka optimalisasi implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan, diharapkan pihak bank dan pemerintah daerah mengoptimalkan sosialisasi mengenai KUR Mikro Syariah agar masyarakat luas mengenal dan memahami maksud dan tujuan Pembiayaan KUR Mikro Syariah. Perlu adanya kerja sama antara bank dan pemerintah daerah sehingga tercipta sinergitas dalam pengelolaan Pembiayaan KUR Mikro Syariah. Kepada pelaku usaha mikro untuk tidak mencampur adukkan penggunaan dana KUR Mikro Syariah dengan kebutuhan konsumsi agar pemanfaatan lebih bijak dan efisien sehingga dapat dirasakan hasil yang maksimal.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pembiayaan KUR Mikro Syariah, BRI Syariah, Usaha Mikro











## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Realisasi Penyaluran KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan .....	7
Gambar 2.1 Skema Transaksi <i>Murabahah</i> .....	30
Gambar 2.2 Skema Transaksi <i>Wakalah</i> .....	34
Gambar 3.1 Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Lamongan .....	53
Gambar 3.2 Ilustrasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah .....	76
Gambar 3.3 Alur Proses Pemberian Pembiayaan KUR Mikro Syariah .....	77



Struktur perekonomian Lamongan masih didominasi oleh 3 lapangan usaha utama, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 38,85%, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor 18,87%, dan Konstruksi 11,11%. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi tahun 2016, lapangan usaha pertanian menyumbang pertumbuhan tertinggi sebesar 1,59%. diikuti lapangan usaha perdagangan sebesar 1,38% dan lapangan usaha industri pengolahan sebesar 0,66%. Hal yang perlu dicermati adalah perkembangan peran dan pertumbuhan kelompok lapangan





lagi ketika menunda pelunasan, belum mampu melunasi sesuai tempo waktu yang ditentukan, maka hutang semakin lama semakin bertambah. Kemudian berdampak pada hasil usahanya, menurun dan kurang produktif.

Hal inilah kemudian menggugah pemerintah untuk membantu perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah khususnya dalam akses permodalan adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).<sup>7</sup> Adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah, perseorangan atau kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup dapat memperoleh pembiayaan modal kerja dan/atau investasi.<sup>8</sup>

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang diharapkan dapat mengakses KUR Syariah adalah yang bergerak di sektor usaha produktif yaitu pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan jasa produksi. Dalam rangka optimalisasi penyaluran KUR Syariah, maka penyalur KUR Syariah dapat memberikan pembiayaan multisektor kepada calon penerima yang memiliki usaha lebih dari satu sektor usaha. Jenis penyaluran KUR Syariah antara lain adalah KUR Mikro.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Media Bisnis UKM Online & Peluang Usaha, “Cara Mendapatkan Modal dari KUR BRI Syariah”, diakses dari <http://goukm.id/modal-kur-syariah-bri>, pada tanggal 18 September 2017.

<sup>8</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, “Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah”, (Brosur).

<sup>9</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 30.

Pada tahun 2017, terhitung hingga bulan Agustus realisasi KUR Mikro di 12 bank, 7 Bank Pembangunan Daerah (BPD), 2 perusahaan pembiayaan, dan 1 Koperasi Kospin Jasa mencapai 42 triliun. Secara rinci realisasi KUR Mikro pada akhir Agustus 2017 dijelaskan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Realisasi Penyaluran KUR Mikro (31 Agustus 2017)<sup>10</sup>

BANK	REALISASI PENYALURAN KUR MIKRO	
	Plafon (Rp/Juta)	Debitur
BRI	41.617.185,36	2.497.511
Bank Mandiri	1.343.363,83	69.055
BNI	59.955,27	2.754
BCA	1.045,5	45
BTPN	52.248,95	3.606
Bank Artha Graha Internasional	84.493	3.464
BRI Syariah	335.032,5	15.121
BPD Bali	9.167	391
BPD Kalimantan Barat	20	1
BPD DI Yogyakarta	27.114	1.478
Bank Sulselbar	3.495	158
Bank Nagari	14.783	828
BJB	350	17
BPD Kalimantan Selatan	6.299	247
Bank Riau Kepri	2.46	116
BPD NTB	849	43
BPD Lampung	1.492	72
Bank Jambi	40	2
BPD Jateng	2.692	90
Adira Dinamika Finance	74,45	6
Mega Central Finance	83,1	4
Koperasi Kospin Jasa	295	12
	42.219.174,13	2.595.021

Sumber: Komite Kredit Usaha Rakyat, 2017.

<sup>10</sup> Kredit Usaha Rakyat, “Data Realisasi KUR”, diakses dari [http://kur.ekon.go.id/realisasi\\_kur/2017/10](http://kur.ekon.go.id/realisasi_kur/2017/10), pada tanggal 16 September 2017.

BRI Syariah berada dalam tiga besar bank penyalur KUR Mikro menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk mendapatkan akad syariah cukup baik. BRI Syariah telah mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyalur KUR Syariah dan telah bekerja sama dengan Jamkrindo Syariah dan Askrindo Syariah. Selain itu BRI Syariah di posisi ke-tiga sebagai penerima jatah penyaluran KUR Mikro menunjukkan akses yang cukup mudah bagi nasabah untuk mengajukan pembiayaan KUR Mikro Syariah. Sebagai salah satu bank syariah penyalur KUR, tentu BRI Syariah memiliki perbedaan dengan bank-bank penyalur KUR lainnya yang berbasis bunga, baik dalam sistem akad, hukum yang digunakan, maupun syarat pengolahan dana, dan lain-lain.

Kantor Cabang maupun Cabang Pembantu BRI Syariah tersebar di seluruh Indonesia. BRI Syariah KCP Lamongan salah satunya menjadi pelaksana, cukup banyak menyalurkan pembiayaan KUR Mikro Syariah sejak Maret 2017. BRI Syariah KCP Lamongan pernah mendapat penghargaan sebagai Unit Kerja Pembiayaan Terbaik pada tahun 2013. Lokasi BRI Syariah KCP Lamongan strategis berada di depan Pasar Lamongan Baru dan terbagi dalam tiga Unit Mikro Syariah (UMS) yaitu

[illegible]









	UIN Sunan Kalijaga, Skripsi 2010	Usaha Rakyat (KUR) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi BRI Unit Godean 1 Yogyakarta)	Rakyat, metode penelitian kualitatif deskriptif.	Wardhana, Indrawan Cahyadi, dan Adrey Julianus Pinem dilakukan pada BRI Konvensional, sedangkan penulis meneliti KUR Syariah di BRI Syariah.
3.	Adrey Julianus Pinem, Universitas Sumatera Utara, Skripsi 2011	Implementasi Kredit Usaha Rakyat dalam Mengembangkan Usaha Kecil (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan)	Implementasi Kredit Usaha Rakyat dalam mengembangkan usaha, metode penelitian deskriptif kualitatif.	
4.	Halimah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Skripsi 2012	Pengaruh Efektifitas, Pengawasan, dan Pembinaan Kredit terhadap Peningkatan Usaha (Studi pada Debitur Kredit Usaha Rakyat Mikro Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Buring Malang)	Kredit Usaha Rakyat Mikro	1. Metode penelitian oleh Halimah Kuantitatif deskriptif 2. Penelitian oleh Halimah pada BRI Konvensional, sedangkan penelitian penulis di BRI Syariah.
5.	Dewi Anggraini, Syahrir	Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi	Kredit Usaha Rakyat, pengembangan	1. Penelitian KUR oleh Dewi dan

	Hakim Nasution, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1, No. 3, Februari 2013	Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)	usaha.	Syahrir pada BRI Konvensional, sedangkan penelitian penulis di BRI Syariah. 2. Analisis regresi linear berganda.
6.	Muhamad Nadratuzzaman Hosen, Mas Arif, UIN Syarif Hidayatullah, Jurnal Liquidity Vol. 3, No.1, Januari-Juni 2014	Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Mandiri di Kabupaten Pati	Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah, metode penelitian kualitatif deskriptif.	1. Lokasi penelitian 2. Teknik analisis data juga menggunakan analisis statistik korelasi dan SWOT.
7.	Akbar Agung Maesya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Skripsi 2015	Implementasi Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak.	Implementasi KUR dalam Pengembangan usaha, metode penelitian deskriptif kualitatif.	Penelitian KUR oleh Akbar Agung Maesya di Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak, sedangkan penulis meneliti KUR Syariah di BRI Syariah KCP Lamongan.

Hasil penelitian Indrawan Cahyadi menyatakan bahwa BRI Unit Godean 1 telah melaksanakan program dari pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kredit usaha rakyat. Program Kredit Usaha Rakyat oleh BRI Unit Godean 1 mempunyai prospek ke depan khususnya masyarakat Godean yang menjadi nasabah KUR di BRI unit Godean 1.<sup>15</sup>

Hasil penelitian Adrey Julianus Pinem menyatakan bahwa implementasi Kredit Usaha Rakyat oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Pekan Tolan sudah berjalan dengan baik dan mampu mengembangkan usaha kecil. Dapat dilihat dari data yang menunjukkan adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung implementasi KUR, kapasitas, fasilitas yang diberikan guna mendukung pelaksanaan KUR, kemudahan prosedur atau proses

<sup>15</sup> Indrawan Cahyadi, "Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi BRI Unit Godean 1 Yogyakarta)", (Skripsi – UIN Sunan Kalijaga, 2010).

administrasi, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, serta adanya komunikasi yang baik antara pihak bank dengan masyarakat.<sup>16</sup>

Hasil penelitian Halimah menyatakan bahwa, variabel independen (efektifitas, pengawasan, dan pembinaan) secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan usaha. Secara parsial variabel independen yang berpengaruh terhadap peningkatan usaha adalah variabel pengawasan, dan pembinaan sedangkan variabel efektifitas tidak berpengaruh.<sup>17</sup>

Hasil penelitian Dewi Anggraini, Syahrir Hakim Nasution menyatakan bahwa modal KUR berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan UMKM di Medan. Faktor paling dominan yang mendorong pengusaha UMKM untuk menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah 37,31% karena tingkat bunga pinjaman BRI yang turun, 29,85% direkomendasikan oleh teman, 17,91% administrasi mudah, 7,46% jangka waktu pelunasan yang lebih lama, dan 7,46% pelayanan yang baik.<sup>18</sup>

Hasil penelitian Muhamad Nadrattuzaman Hosen, Mas Arif (2014) menyatakan bahwa karakteristik debitur KUR di BSM adalah 57,69% laki-laki, 85,71% perusahaan, 50% lulusan sekolah menengah atas, dan 50% debitur telah menjadi UKM antara 1-10 tahun. Faktor penentu dari debitur

<sup>16</sup> Adrey Julianus Pinem, “Implementasi Kredit Usaha Rakyat dalam Mengembangkan Usaha Kecil (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan)”, (Skripsi – Universitas Sumatera Utara, 2011).

<sup>17</sup> Halimah, “Pengaruh Efektifitas, Pengawasan, dan Pembinaan Kredit terhadap Peningkatan Usaha (Studi pada Debitur Kredit Usaha Rakyat Mikro Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Buring Malang)”, (Skripsi – UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012).

<sup>18</sup> Dewi Anggraini, Syahrir Hakim Nasution, “Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)”, (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1, No. 3, Februari 2013), diakses dari [https://www.neliti.com/journals/jurnal-ekonomi-dan-keuangan?per\\_page=10&page=10](https://www.neliti.com/journals/jurnal-ekonomi-dan-keuangan?per_page=10&page=10), pada tanggal 11 Oktober 2017.

KUR di BSM diasumsikan menjadi lima variabel, yaitu informasi prosedur KUR, persepsi debitur terhadap KUR, biaya transaksi, pemahaman mereka terhadap nilai KUR dan nilai Islam.<sup>19</sup>

Hasil penelitian Akbar Agung Maesya (2015) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak belum optimal.<sup>20</sup>

### E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan KUR Mikro di BRI Syariah KCP Lamongan.
2. Untuk mengetahui peran pembiayaan KUR Mikro BRI Syariah dalam pengembangan Usaha Mikro.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- ## 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi Syariah. Menjadi bahan kajian untuk mendalami konsep prinsip-prinsip Perbankan Syariah.

<sup>19</sup> Muhamad Nadratuzzaman Hosen, Mas Arif, “Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Mandiri di Kabupaten Pati”, (Jurnal Liquidity Vol. 3, No.1, Januari-Juni 2014), diakses dari <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/al-infaq/article/view/52>, pada tanggal 1 Oktober 2017.

<sup>20</sup> Akbar Agung Maesya, “Implementasi Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak”, (Skripsi – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015).



## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak bank. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai KUR Syariah serta prosedur KUR Mikro pada BRI Syariah agar lebih mudah dalam memperoleh pembiayaan untuk usahanya. Selain itu, dapat dijadikan bahan referensi bagi pembaca dan peneliti berikutnya.

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah konsep/variabel agar dapat diukur, dengan cara melihat pada dimensi (indikator) dari suatu konsep/variabel.<sup>21</sup> Untuk mempermudah pemahaman istilah dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

## 1. Implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah

Implementasi menurut bahasa adalah pelaksanaan.<sup>22</sup> KUR Mikro Syariah merupakan program pemerintah berupa pembiayaan modal kerja dan atau investasi usaha oleh BRI Syariah dengan jumlah paling banyak sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada usaha produktif dan layak yang sumber dananya berasal sepenuhnya dari bank.

## 2. Pengembangan Usaha Mikro

Pengembangan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan untuk membantu Usaha Mikro dalam mengatasi kelemahan-kelemahan yang

<sup>21</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 98.

<sup>22</sup> Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), 562.

dimiliki guna meningkatkan atau mengembangkan usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh. BRI Syariah KCP Lamongan selaku bank pelaksana penyaluran Pembiayaan KUR Mikro Syariah turut serta dalam hal ini. Memperhatikan sisi kualitas dengan memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai mengenai usaha mikro. Dari sisi kuantitas, Bank Sentral telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro.<sup>23</sup>

### a. Data Primer

### b. Data Sekunder

<sup>25</sup> Bambang Sungkono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 116.

[illegible]

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber data primer ini diperoleh melalui wawancara kepada pihak BRI Syariah KCP Lamongan *Unit Head, Account Officer Micro*, dan nasabah/debitur pembiayaan KUR Mikro Syariah yang dianggap dapat memberikan informasi.

### b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung, bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, foto, dan lain-lain.<sup>27</sup> Penulis membutuhkan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, brosur, website, dan undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan pembiayaan KUR Syariah dan usaha Mikro.

1. Perbankan Syariah, Ismail.
2. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Andri Soemitra.
3. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Sunarto Zulkifi.
4. Perbankan Syariah di Indonesia, Basaria Nainggolan.
5. Mengelola Bisnis Pembiayaan Syariah, Ikatan Bankir Indonesia.
6. Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah, LPPI, BI.
7. Brosur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI,

<sup>27</sup> Ibid.

8. *Website* [www.kur.ekon.go.id](http://www.kur.ekon.go.id), [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id),  
[www.lamongankab.bps.go.id](http://www.lamongankab.bps.go.id)

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan.<sup>28</sup>

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dengan proses tanya jawab langsung yang bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi masalah tertentu.<sup>29</sup> Dalam teknik pengumpulan data menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner. Wawancara sendiri dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam.<sup>30</sup> Pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada informan atau pihak yang berhubungan dan memiliki relevansi terhadap masalah yang berhubungan dengan implementasi pembiayaan KUR Mikro Syariah dalam pengembangan Usaha Mikro.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 225.

<sup>29</sup> Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.

<sup>30</sup> Sulistyono dan Basuki, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006), 173.





Pada penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh harus mendalam, jelas, dan spesifik. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 243.

## BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam pembahasan metode penelitian membahas tentang data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

<sup>37</sup> Hari Wijaya, *M. Jailani, Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Hangar Creator, 2008), 29.

## BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini. Dijelaskan mengenai teori implementasi kebijakan, pembiayaan syariah, kredit usaha rakyat (KUR) syariah, Usaha Mikro.

### BAB III : DATA PENELITIAN

Bab ini berisi tentang deskripsi data hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu gambaran umum tentang BRI Syariah KCP Lamongan, visi misi, struktur organisasi, pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan, prosedur pembiayaan KUR Mikro Syariah, pelaksanaan pembiayaan KUR Mikro Syariah, kendala penyaluran KUR Mikro Syariah, peran KUR Mikro Syariah dalam pengembangan Usaha Mikro.

## BAB IV : ANALISIS DATA

Pada analisis data dijelaskan tentang temuan penelitian, yakni analisis terhadap implementasi pembiayaan KUR Mikro Syariah dalam pengembangan Usaha Mikro oleh BRI Syariah KCP Lamongan.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang bersifat konstruktif pada pihak yang terkait dalam penelitian ini.



Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998,

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>40</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa *return* balas jasa atas pembiayaan bank syariah tidak dalam bentuk bunga, melainkan dalam bentuk bagi hasil, *margin* atau imbalan lainnya sesuai dengan akad-akad yang diterapkan di bank syariah.<sup>41</sup> Dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa bunga atau apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman itu haram hukumnya.<sup>42</sup> Berikut QS. Al-Baqarah ayat 278, ayat terakhir yang diturunkan mengenai riba:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”<sup>43</sup>

Larangan riba dalam hadits, amanat terakhir Rasulullah pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah menyampaikan:<sup>44</sup>

“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok)

<sup>40</sup> Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 Angka 1.

<sup>41</sup> Ibid., 106.

<sup>42</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 50.

<sup>43</sup> QS. Al-Baqarah: 278.

<sup>44</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah....*, 51.

kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.”

Dari sanalah dipahami bahwa riba merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil. Riba berdampak negatif terhadap ekonomi maupun sosial masyarakat.<sup>45</sup> Penyaluran pembiayaan dilakukan dengan semangat tolong-menolong dalam kebajikan dan kebaikan, oleh sebab itu aspek ibadah dan akhlak menjadi hal yang utama dalam kegiatan bisnis. Filosofi penyaluran pembiayaan sebagai upaya penyebaran kemaslahatan untuk masyarakat, bukan sekedar mencari keuntungan. Secara eksplisit dinyatakan dalam Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>46</sup>

Dalam pembiayaan dituntut adanya kepercayaan (*trust*), yaitu kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana yakni bank syariah kepada pihak yang menerima dana (debitur) bahwa dana yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima dana sebagai mitra usaha mendapatkan kepercayaan sehingga berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan

<sup>45</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, 50.

<sup>46</sup> QS. Al-Jumu'ah: 10.

Pembiayaan yang disalurkan bank syariah memberikan manfaat bagi bank sendiri, debitur/nasabah, dan pemerintah. Manfaat pembiayaan bagi bank berupa pendapatan *margin* keuntungan atau bagi hasil sesuai akad pembiayaan yang diperjanjikan sebelumnya antara bank syariah dan debitur, meningkatkan profitabilitas bank, serta kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai bank dalam memahami secara rinci aktivitas usaha para debitur di berbagai sektor usaha.<sup>48</sup>

Manfaat pembiayaan bagi debitur yaitu terpenuhinya kebutuhan pada saat yang diperlukan dengan pengembalian dana beberapa waktu kemudian, meningkatkan usaha debitur, dan murah biaya yang diperlukan untuk pembiayaan. Selain itu, jangka waktu pembiayaan yang disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan debitur membayar kembali pembiayaannya.<sup>49</sup>

Manfaat pembiayaan bagi pemerintah adalah sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil karena uang di bank tersalurkan kepada pihak pelaku usaha, juga sebagai pengendali moneter. Pembiayaan dapat menciptakan lapangan kerja baru, penyerapan jumlah tenaga kerja

<sup>48</sup> Ibid, 110.

[illegible]



### 3. Akad Pembiayaan

Ketentuan PBI No.10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI No. 9/19/PBI/2007, akad berarti kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan Syariah. Ketentuan Pasal 1 angka 13 UU Perbankan Syariah, akad diartikan sebagai kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Jenis akad yang diterapkan dalam bank syariah meliputi akad *wadiah, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna', wakalah, ijarah, muntahiya bi al-tamlik, qard, hawalah, dan kafalah*.<sup>54</sup> Ada tiga bentuk akad jual beli yang sudah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu *murabahah, salam, dan istishna'*.<sup>55</sup>

Akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, kemudian pembeli membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Berdasarkan firman Allah SWT Surah An-Nisa ayat 29 dan Hadits Nabi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَرَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>56</sup>

<sup>56</sup> OS, An-Nisa: 29.



1. Sebelum transaksi jual beli dilaksanakan, bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi mengenai barang yang akan dibeli, spesifikasi dan kualitas barang, serta harga jual.
2. Bank syariah dan nasabah melakukan akad, dalam akad ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang. Akad *Murabahah* yang dilakukan bank syariah dan nasabah harus bebas riba. Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli adalah barang yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.
3. Berdasarkan akad, bank syariah membelikan barang sesuai dengan keinginan nasabah. Bank syariah membiayai seluruh atau sebagian harga pembelian barang yang disepakati spesifikasinya. Bank syariah dapat membeli barang atas nama bank sendiri maupun melalui *supplier*. Semua hal yang berkaitan dengan pembelian harus disampaikan oleh bank syariah kepada nasabah.
4. Kemudian atas perintah bank syariah, *supplier* mengirimkan barang ke nasabah.
5. Nasabah menerima barang dan dokumen kepemilikan barang lalu melakukan pembayaran.

6. Nasabah membayar harga barang pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Pembayaran bisa secara tunai, tangguh, ataupun diangsur. Lazimnya pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur.<sup>59</sup>

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا

“Bekata Yusuf, ‘Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.’”<sup>63</sup>

“Bahwasannya Rasulullah saw. mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti al-Harits.”<sup>64</sup>

<sup>64</sup> Malik No. 678, Kitab al-Muwaththa', Bab Haji.





seperti kebutuhan bahan baku dan pembelian barang-barang dagangan. Pembiayaan ini diperlukan karena beberapa alasan seperti diversifikasi usaha dan produk, tagihan dari *supplier* lebih cepat dibandingkan dengan pembayaran dari *customer*, dan penambahan persediaan barang atau menjaga persediaan pada level minimum.

- c. Pembiayaan konsumsi, yaitu pembiayaan pembiayaan yang diberikan untuk pembelian yang digunakan sendiri atau bersifat konsumtif. Contohnya Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dan Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor.<sup>68</sup>

Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya terdiri dari pembiayaan jangka pendek, biasanya diberikan bank syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang memiliki siklus kerja satu tahun dan pengembalian disesuaikan kemampuan nasabah; kemudian pembiayaan jangka panjang waktunya lebih dari tiga tahun, pada pembiayaan yang nominalnya besar.

Pembiayaan dilihat dari sektor usaha dibagi menjadi lima sektor:<sup>69</sup>

- a. Sektor industri, pembiayaan kepada sektor usaha yang mengubah suatu barang menjadi barang lain atau mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi yang mempunyai nilai manfaat lebih tinggi seperti industri kimia, tekstil, elektronik, dan pertambangan.

<sup>68</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan...*, 50.

<sup>69</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...*, 115.



kuat, serta kebijakan dan prosedur yang jelas. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah Ash-Shaaf ayat 4 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقْتُلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَا كَانَهُمْ بَنِينَ مَرْصُوصًا

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”<sup>72</sup>

Kebijakan dan prosedur pembiayaan meliputi proses analisis, persetujuan, pencairan, pemantauan, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.<sup>73</sup>

Secara umum, fungsi-fungsi organisasi pembiayaan meliputi:<sup>74</sup>

- 1.) Fungsi strategis dan penetapan kebijakan pembiayaan
- 2.) Fungsi pemasaran/penjualan
- 3.) Fungsi pengambilan keputusan/pemegang kewenangan/komitee pembiayaan
- 4.) Fungsi administrasi pembiayaan
- 5.) Fungsi monitoring dan kebijakan pembiayaan.

## 6. Proses Pembiayaan

Proses pembiayaan bank syariah melalui beberapa tahap yang kompleks dan terukur. Berawal dari pengumpulan informasi dan verifikasi, analisis dan persetujuan pembiayaan, administrasi dan pembukuan pembiayaan, pemantauan pembiayaan sampai pelunasan dan

<sup>72</sup> QS. Ash-Shaaf: 4.

<sup>73</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan...*, 4.

<sup>74</sup> Ibid, 11.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”<sup>76</sup>

Prinsip kehati-hatian Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan meliputi penilaian 5C+1S, yakni sebagai berikut:<sup>77</sup>

- 1.) *Character* , yaitu penilaian terhadap karakter calon nasabah penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
- 2.) *Capital*, yaitu penilaian pihak bank terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon nasabah penerima pembiayaan. Semakin banyak modal yang dimiliki, maka bank semakin percaya.

<sup>77</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis...*, 153.

## 1. Pengertian KUR Mikro Syariah

[illegible]

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu/perorangan maupun kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Tujuan KUR Syariah yaitu meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada sektor produktif; meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sumber dana KUR Syariah bersumber dari dana Lembaga Keuangan Syariah penyalur KUR Syariah. Terdapat fasilitas penjaminan pembiayaan dalam KUR Syariah, yaitu Askrindo Syariah dan Jamkrindo Syariah.<sup>79</sup> Penjaminan pembiayaan merupakan suatu kegiatan pelengkap bagi suatu pembiayaan.

*murabahah* dengan margin yang merupakan besaran keuntungan atau

<sup>80</sup> Go UKM, “Cara Mendapatkan Modal dari KUR BRI Syariah”, diakses dari <http://goukm.id/modal-kur-syariah-bri/>, pada tanggal 17 Desember 2017.

imbalan bagi hasil yang ditetapkan dalam pemberian KUR Mikro Syariah. Terdapat subsidi margin dari pemerintah yakni selisih antara tingkat margin yang diterima oleh penyalur KUR Mikro Syariah dengan tingkat margin yang dibebankan kepada penerima KUR Mikro Syariah.<sup>81</sup>







## 1. Pengertian Pengembangan Usaha

Menurut Mahmud Mach Foedz, pengembangan usaha adalah perdagangan yang dilakukan oleh orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Menurut Hughes dan Kapoor, pengembangan usaha adalah kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang jasa guna mendapatkan keuntungan.<sup>88</sup>

Adapun unsur-unsur penting dalam mengembangkan usaha ada 2 (dua), yaitu:

<sup>88</sup> Academia, “Ada Beberapa Definisi Pengembangan Usaha Menurut Para Ahli”, diakses dari [http://www.academia.edu/8665059/Ada\\_beberapa\\_definisi\\_pengembangan\\_usaha\\_menurut\\_para\\_ahli](http://www.academia.edu/8665059/Ada_beberapa_definisi_pengembangan_usaha_menurut_para_ahli), pada tanggal 5 April 2018.

- 1.) Adanya niat dari pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar.
- 2.) Mengetahui teknik memproduksi barang seperti banyak barang yang harus diproduksi, cara apa yang harus digunakan untuk mengembangkan produk dan lain-lain.
- 3.) Membuat anggaran yang bertujuan mengetahui seberapa besar pemasukan dan pengeluaran produk.<sup>89</sup>

saja. Kreativitas akan memberikan banyak kontribusi bagi pengembangan sebuah usaha.<sup>90</sup>

#### D. Usaha Mikro

## 1. Pengertian Usaha Mikro

Menurut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1995, usaha mikro adalah usaha produktif milik individu perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Menurut Bank Indonesia, usaha mikro adalah usaha yang dimiliki oleh sumber daya lokal dengan teknologi sederhana.<sup>91</sup> Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, jumlah aset maksimal usaha mikro sebesar Rp 50 juta dan omzet/hasil penjualan per tahun maksimal Rp 300 juta.<sup>92</sup> Menurut Febra Robiyanto, usaha mikro bergerak dalam berbagai jenis pekerjaan, antara lain usaha jasa, usaha perdagangan, usaha industri, usaha pertanian, peternakan, dan perikanan.<sup>93</sup>

Menurut Kwartono, Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara garis besar dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:<sup>94</sup>

- a. Usaha Perdagangan, meliputi pengecer, keagenan, ekspor/impor produk lokal, dan sektor informal.
- b. Usaha Pertanian, meliputi peternakan, perikanan, dan perkebunan.

<sup>90</sup> Ibid.

<sup>91</sup> Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1995.

<sup>92</sup> Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2008.

<sup>93</sup> Febrd Robiyanto, *Akuntansi Praktis untuk Usaha Kecil dan Menengah*, (Semarang: Studi Nusa: 2004), 4.

<sup>94</sup> M. Kwartono, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), 26.

Menurut LPPI dan BI dalam Profil Bisnis UMKM, usaha mikro mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>95</sup>

- Menurut IBI, ada beberapa karakteristik yang membedakan antara pelaku usaha mikro dengan Usaha Kecil Menengah (UKM), diantaranya:<sup>96</sup>

[illegible]









Kini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah pemilik aset terbesar ke-tiga. PT. Bank BRI Syariah tumbuh pesat baik dari sisi aset, perolehan dana pihak ke-tiga, dan jumlah pembiayaan. PT. Bank BRI Syariah berfokus pada segmen menengah ke bawah dengan target menjadi bank ritel modern terkemuka yang memiliki berbagai jenis produk dan layanan perbankan.

BRI Syariah KCP Lamongan berdiri pada tanggal 15 Februari 2013 tepatnya di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 15 Lamongan. BRI Syariah KCP Lamongan merupakan anak cabang dari BRI Syariah KC Gresik. Penghargaan yang pernah diraih BRI Syariah KCP Lamongan diantaranya sebagai Unit Kerja Pembiayaan Terbaik pada tahun 2015 dan Unit Kerja Terkompak pada tahun 2016.<sup>100</sup>

<sup>100</sup> Dias, UMS Head Babat, *Wawancara*, Lamongan, 13 Desember 2017.







### 3.) *Teller*

#### 4.) *Customer Service*

### 5.) *Account Officer*







Pembiayaan Kepemilikan Mobil dari BRI Syariah kepada nasabah perorangan yang membutuhkan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli akad *murabahah bil wakalah*, dimana pembayaran dilakukan setiap bulan secara mengangsur dengan jumlah angsuran ditetapkan di muka.

d. Pembiayaan Umrah BRI Syariah

Pembiayaan Kepemilikan Multifaedah dari BRI Syariah kepada para pensiunan untuk memenuhi keseluruhan atau sebagian kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip *murabahah* atau *ijarah* dimana pembayaran dilakukan setiap bulan dengan jumlah angsuran sudah ditetapkan di muka.

f. KMF Pra Purna BRI Syariah

*murabahah bil wa  
ijarah wal wakalah.*

#### h. Pembiayaan Kepemilikan Emas

Pembiayaan dengan agunan/jaminan berupa emas, dimana emas yang dijamin disimpan dan dipelihara oleh BRI Syariah selama jangka waktu tertentu. Nasabah membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas emas.

j. Mikro BRI Syariah



fasilitas penjaminan yaitu PT Jamkrindo Syariah dan Askrindo Syariah dengan plafon maksimal 25 juta dan minimal 5 juta.”<sup>104</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Pak Amun dan Mba Bibah selaku AOM:

“KUR BRI Syariah adalah pembiayaan yang khusus disalurkan BRI Syariah bekerja sama dengan Pemerintah. BRI Syariah sebagai bank syariah pertama yang dipercaya menyalurkan KUR Syariah dan itu sasaran utamanya masyarakat menengah ke bawah, untuk meningkatkan perekonomian kelas menengah ke bawah terutama yang belum pernah berinteraksi dengan bank, maksimal plafon Rp 25 juta.”<sup>105</sup>

“Pembiayaan KUR Mikro Syariah merupakan pembiayaan dengan agunan yang sifatnya tidak wajib, plafon KUR Mikro Syariah minimal 5 juta maksimal 25 juta itu satu nasabah.”<sup>106</sup>

Sumber dana KUR Mikro Syariah berasal dari Lembaga Keuangan Syariah atau Bank Penyalur KUR Syariah yaitu BRI Syariah. Pemerintah berperan dalam memberikan subsidi margin. Banyak subsidi margin dari pemerintah sebesar 10,0% termasuk di dalamnya imbal/balas jasa penjaminan. Jadi *margin* yang ditetapkan dalam pemberian KUR Mikro Syariah sebesar 9% efektif per tahun atau 0,4% per bulan. Berikut penuturan petugas BRI Syariah KCP Lamongan:

“Sumber dananya berasal dari BRI Syariah sendiri, cuman marginnya itu ada subsidi dari pemerintah. *Margin* KUR sebesar 9% per tahun, setara dengan 0,4 per bulan.”<sup>107</sup>

“Pendanaan KUR Mikro Syariah dari pemerintah, eh iya dari BRI Syariah, dengan *margin* sebesar 0,4% per bulan atau 9% efektif per tahun.”<sup>108</sup>

<sup>104</sup> Dias, UMS Head Babat, *Wawancara*, Lamongan, 13 Desember 2017.

<sup>105</sup> Amun, AOM Babat, *Wawancara*, Lamongan, 13 Desember 2017.

<sup>106</sup> Bibah, AOM Paciran, *Wawancara*, Lamongan, 12 Desember 2017.

<sup>107</sup> Amun, AOM Babat, *Wawancara*, Lamongan, 13 Desember 2017.

<sup>108</sup> Fariz, AOM Paciran, *Wawancara*, Lamongan, 12 Desember 2017.

“Jadi gini, itu kan KUR Program Pemerintah, tetap modal utamanya dari BRI Syariah, hanya saja terdapat subsidi margin dari pemerintah, banyak subsidi yang diberikan pemerintah sebesar 10,0%, jadi *margin* yang dibebankan kepada nasabah tinggal 0,4% per bulan sesuai kontrak pembiayaannya.”<sup>110</sup>

“Sumber dana KUR Mikro Syariah dari Pemerintah, kan itu program pemerintah, BRI Syariah sebagai penyalurnya. *Marginnya 9% efektif per tahun.*”<sup>111</sup>

Akad yang diterapkan dalam pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan ialah akad *murabahah bil wakalah*,

- a. Akad *murabahah* adalah akad transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana BRI Syariah KCP Lamongan menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan barang kepada pembeli/debitur.
- b. Akad *wakalah* adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh BRI Syariah KCP Lamongan kepada nasabah/debitur, dalam hal ini BRI Syariah KCP Lamongan mewakilkan kepada debitur untuk membeli barang yang dibutuhkannya sendiri.<sup>112</sup>

“Akad KUR Mikro Syariah sama seperti pembiayaan mikro reguler, menggunakan akad *murabahah*, yaitu akad jual beli. Ada akad yang mendampingi akad *murabahah*, namanya akad wakalah.”<sup>113</sup>

## 2. Jenis Pembiayaan KUR Mikro Syariah

<sup>110</sup> Dias, UMS Head Babat, *Wawancara*, Lamongan, 13 Desember 2017.

<sup>111</sup> Jabal, AOM Babat, *Wawancara*, Lamongan, 15 Januari 2018.

<sup>112</sup> Fani, UMS *Head* Paciran, *Hasil Wawancara*, Lamongan, 8 Desember 2017.

<sup>113</sup> Amun, AOM Babat, *Wawancara*, Lamongan, 13 Desember 2018.







“Usahanya maksimal 5 km dari UMS, jadi kalau misalnya di UMS Lamongan sendiri radiusnya ke Barat, Selatan, Utara, Timur maksimal 5 km. Hal ini agar kami mudah melakukan *monitoring* karena usaha dijadikan jaminan pokok. Gini, di Lamongan sendiri kan ada 3 UMS, satu unit Lamongan, kedua UMS Babat, ketiga UMS Paciran. Jadi kalau misalnya ada calon nasabah KUR Mikro daerah bagian Barat ternyata itu radiusnya terlalu jauh dari UMS Lamongan, masuknya nanti ke UMS Babat. Pokoknya usahanya, kadang rumahnya jauh, usahanya di dekat pasar Lamongan, itu boleh dibiayai”<sup>119</sup>

- a. Seluruh usaha mikro sektor pertanian, termasuk tanaman hortikultura, tanaman pangan, peternakan, dan perkebunan.
- b. Seluruh usaha mikro sektor industri pengolahan, termasuk industri kreatif di bidang *fashion* dan periklanan.
- c. Seluruh usaha mikro di sektor perikanan, termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- d. Seluruh usaha mikro di sektor perdagangan, termasuk pedagang eceran dan kuliner. Namun sejak Agustus 2017 BRI

[illegible]







“Surat nikah barang ta iko lali aku mbak, KK, E-KTP, SKU, jaminan BPKB motor usaha perikanan udang. Ga nyongko mbak prosese cepet.”<sup>128</sup>

“Damel usaha ten saben, jaminan BPKB motor. Syarate nggih niku KK, E-KTP, SKU opo mane yo, wes suwe mbak.”<sup>129</sup>

Dalam menilai suatu permohonan pembiayaan, BRI Syariah KCP Lamongan perlu memperhatikan beberapa hal antara lain sebagai berikut.<sup>130</sup>

- a. Bank hanya memberikan pembiayaan apabila permohonan pembiayaan secara tertulis.
- b. Permohonan pembiayaan harus memuat informasi lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- c. Petugas bank (AOM) memastikan kebenaran data informasi yang disampaikan dalam permohonan pembiayaan.

## 2.) Tahap BI *Checking*

Tahap ini dimaksudkan untuk mengecek informasi pembiayaan yang pernah diperoleh debitur sebelumnya serta kolektibilitasnya, apakah calon nasabah mempunyai pinjaman di bank lain atau tidak. AOM melakukan BI *Checking* melalui sistem internal BRI Syariah dan Sistem Informasi Debitur (SID) kepada

<sup>128</sup> Bu Sul, Nasabah KUR Mikro Syariah Sektor Perikanan, *Wawancara*. Lamongan, 30 Januari 2018.

<sup>129</sup> Bu Fa, Nasabah KUR Mikro Syariah Sektor Pertanian, *Wawancara*. Lamongan, 30 Januari 2018.

<sup>130</sup> Jabal, AOM Babat, *Hasil Wawancara*, Lamongan, 15 Januari 2018.



Debitur yang berada pada kol. 2-5 sulit mendapatkan persetujuan pembiayaan dikarenakan membayar angsuran tidak tepat waktu. AOM melakukan verifikasi hasil BI *Checking* dan Daftar Hitam BI *Clear*. Apabila calon nasabah tidak memenuhi syarat tersebut, maka registrasi status aplikasi ditolak, AOM menginformasikan ke calon nasabah dan proses selesai.<sup>131</sup>

Tahap survei meliputi kelayakan usaha dan karakter calon nasabah, serta *trade checking* di sekitar lingkungan. Pada tahap ini, AOM mengunjungi langsung ke tempat calon nasabah untuk mengecek kebenaran data dengan melihat secara fisik tempat usaha. Karakter merupakan data tentang kepribadian calon nasabah seperti kebiasaannya, sifat pribadi, cara hidup, keadaan, dan latar belakang keluarga.<sup>132</sup>

<sup>131</sup> Bibah, AOM Paciran, *Hasil Wawancara*, Lamongan, 12 Desember 2017.

[illegible]

kebenaran data antara lain tempat tinggal, penghasilan, legalitas usaha, pekerjaan, dan omzet penjualan.<sup>133</sup>

“Di sini masyarakatnya banyak yang mampu dan berminat mengambil KUR Mikro Syariah, namun tidak semua punya iktikad baik untuk membayar pinjaman, jadi tidak bisa sembarang kami memberikannya.”<sup>136</sup>

*Capacity* merupakan kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh keuntungan yang diharapkan. Penilaian kapasitas berguna untuk mengukur kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pinjamannya secara tepat waktu dari usaha yang dijalankannya.

<sup>136</sup> Fariz, AOM Paciran, *Wawancara*, Lamongan, 15 Januari 2018.

kemampuan usahanya kecil, tentu tidak layak diberi pembiayaan skala besar.”<sup>137</sup>

c. *Capital* (Modal)

*Capital* yang dimaksud adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Penilaian modal sendiri ini diperlukan BRI Syariah KCP Lamongan sebagai alat indikator kesungguhan dan tanggung jawab nasabah.

“Seperti pertanian, adanya lahan sawah yang dimiliki. Perikanan, terbukti dengan adanya tambak. Semakin luas maka bisa dikatakan modal yang dimiliki banyak, maka kami semakin percaya.”<sup>138</sup>

d. *Collateral* (Agunan/Jaminan)

Agunan pokok dalam pembiayaan KUR Mikro Syariah berupa usaha yang dibiayai, sedangkan agunan tambahan bersifat tidak wajib. Penilaian agunan yaitu mengenai kelayakan usaha, diketahui dari hasil survei yang telah dilakukan. Terdapat titipan jaminan berupa BPKB kendaraan dan sertifikat tanah usaha, tanpa ada pengikatan jaminan.

“KUR Mikro Syariah ini jaminan tambahannya tidak wajib dipenuhi, namun ada titipan jaminan seperti BPKB kendaraan, surat tanah. Tidak ada pengikatan jaminan dalam pembiayaan ini”<sup>139</sup>

e. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi/Prospek Usaha)

*Condition of Economy* adalah kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat yang mempengaruhi usaha calon nasabah

<sup>137</sup> Ibid.

<sup>138</sup> Jabal, AOM Babat, *Wawancara*, Lamongan, 15 Januari 2018.

139 Ibid.

f. Sharia (Syariah)

“Dari prinsip 5C+1S, yang perlu mendapat perhatian *AOM* dan *UMS Head* BRI Syariah KCP Lamongan dalam menganalisis pembiayaan KUR Mikro Syariah adalah karakter dan kondisi usaha, karena jika prinsip ini tidak terpenuhi maka prinsip lainnya tidak berarti, dengan kata lain permohonannya harus ditolak.”<sup>142</sup>

Pada tahap ini, calon nasabah akan memperoleh keputusan pembiayaan yang berisi persetujuan akan adanya pemberian KUR Mikro Syariah sesuai dengan permohonan yang diajukan. AOM BRI Syariah KCP Lamongan akan memberitahukan kepada calon nasabah untuk mengkonfirmasi kembali. Pemberian putusan

<sup>142</sup> Dias, UMS Head Babat, *Wawancara*, Lamongan, 13 Desember 2017.

pembiayaan dilakukan 3-5 hari mulai dari AOM menerima permohonan pembiayaan KUR Mikro Syariah.<sup>143</sup>

6.) Tahap Pencairan Pembiayaan/ Akad Pembiayaan

Setelah semua persyaratan terpenuhi dan proses disetujui, pencairan pembiayaan kepada nasabah dilakukan dengan akad *murabahah bil wakalah*. Adanya akad *wakalah* yang mendampingi *murabahah* dikarenakan banyaknya peminat yang hendak menjadi calon debitur KUR Mikro Syariah, mengingat jumlah tenaga yang menangani KUR Mikro Syariah tidak sebanding dengan jumlah peminat KUR Mikro Syariah. Jadi nasabah mendapat limpahan kekuasaan dari bank untuk membeli barang yang dibutuhkannya sendiri.

“Penandatanganan tidak boleh diwakilkan, jika ada nasabah yang tidak bisa datang ke kantor, baik itu berhalangan hadir, sakit atau sudah tua, kami yang mendatangi ke rumahnya. Dengan syarat ada bukti dokumentasi seperti foto.”<sup>144</sup>

Dalam penandatanganan pencairan terdapat dua materai. Satu materai untuk akad wakalah ketika pencairan dana, dan satunya *murabahah* ditandatangani ketika penyeteroran bukti pembelian barang berupa nota kepada AOM BRI Syariah KCP Lamongan. Penyerahan bukti pembelian barang maksimal dua minggu setelah pencairan pembiayaan.

<sup>143</sup>Jabal, AOM Babat, *Hasil Wawancara*, Lamongan, 15 Januari 2018.

<sup>144</sup> Ibid.

Setelah penandatanganan akad, nasabah didampingi AOM membuka rekening, membuat CIF dan membuka tabungan mikro untuk hasil realisasi, pendebetan biaya-biaya, dan pembayaran angsuran. Pada saat pencairan, dana KUR yang diterima tidak sepenuhnya. Dana pencairan di-*hall* (ditahan) satu angsuran untuk angsuran terakhir. Jadi angsuran yang semula 36 kali tinggal 35 kali. Hal ini untuk mengantisipasi jika ada wanprestasi.

**Gambar 3.2** Ilustrasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah

Nama : Bu Hayati (nama disamarkan)  
 Alamat : Gg. Beringin III RT 04/08 Tumenggungan,  
 Kabupaten Lamongan.  
 Limit Pembiayaan : Rp 15 Juta  
 Jenis Pembiayaan : *Murabahah bil wakalah* – Modal Kerja  
 Tujuan Pembiayaan : Pembelian barang untuk modal usaha jasa  
 Jangka Waktu : 36 (tiga puluh enam) bulan/ 3 tahun  
 Angsuran per bulan : Rp 476.996,00  
 Penjamin : Jamkrindo Syariah dan BPKB Motor  
 Pengikatan Jaminan : Tidak ada

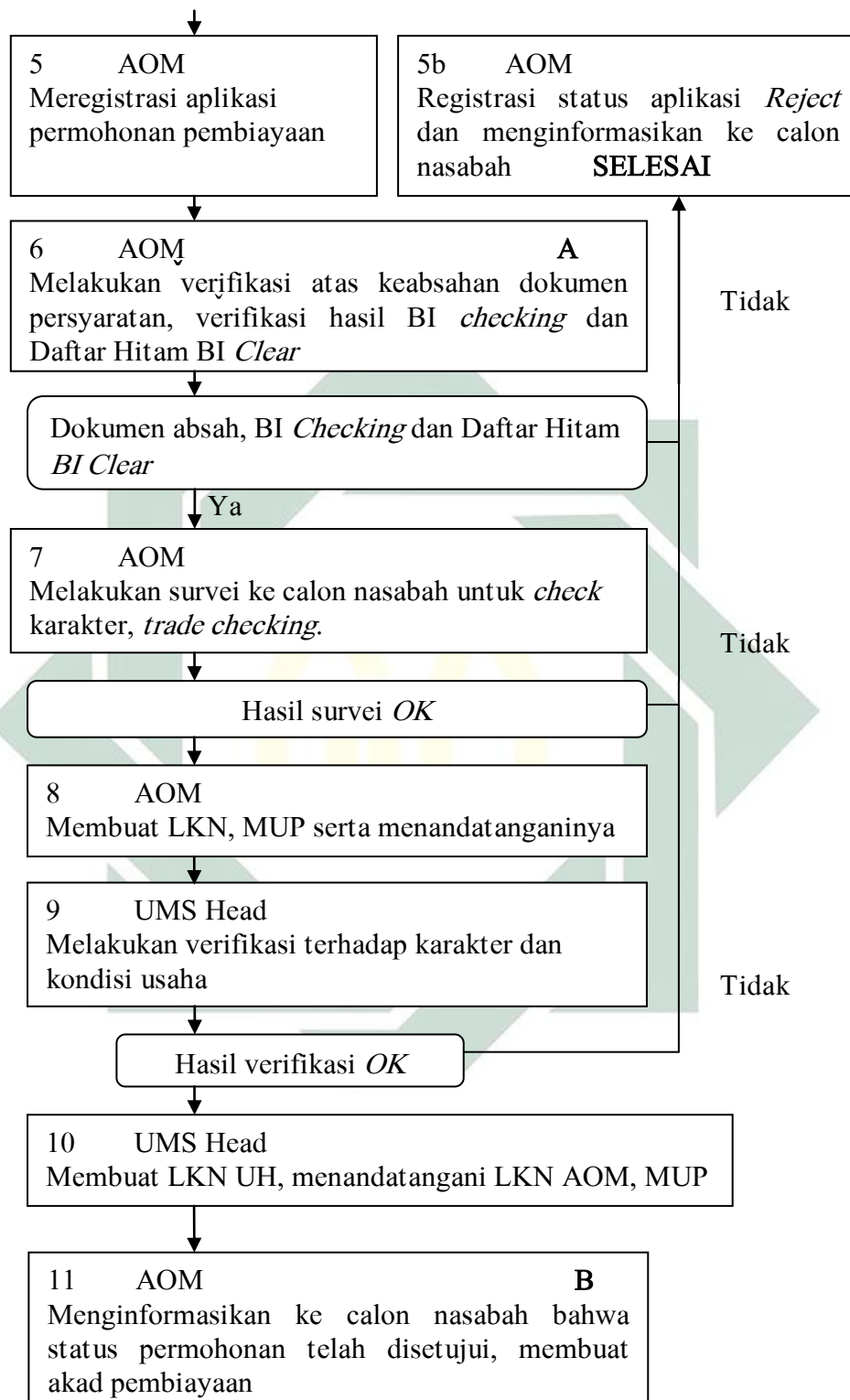
Sumber: BRI Syariah KCP Lamongan, 2017.

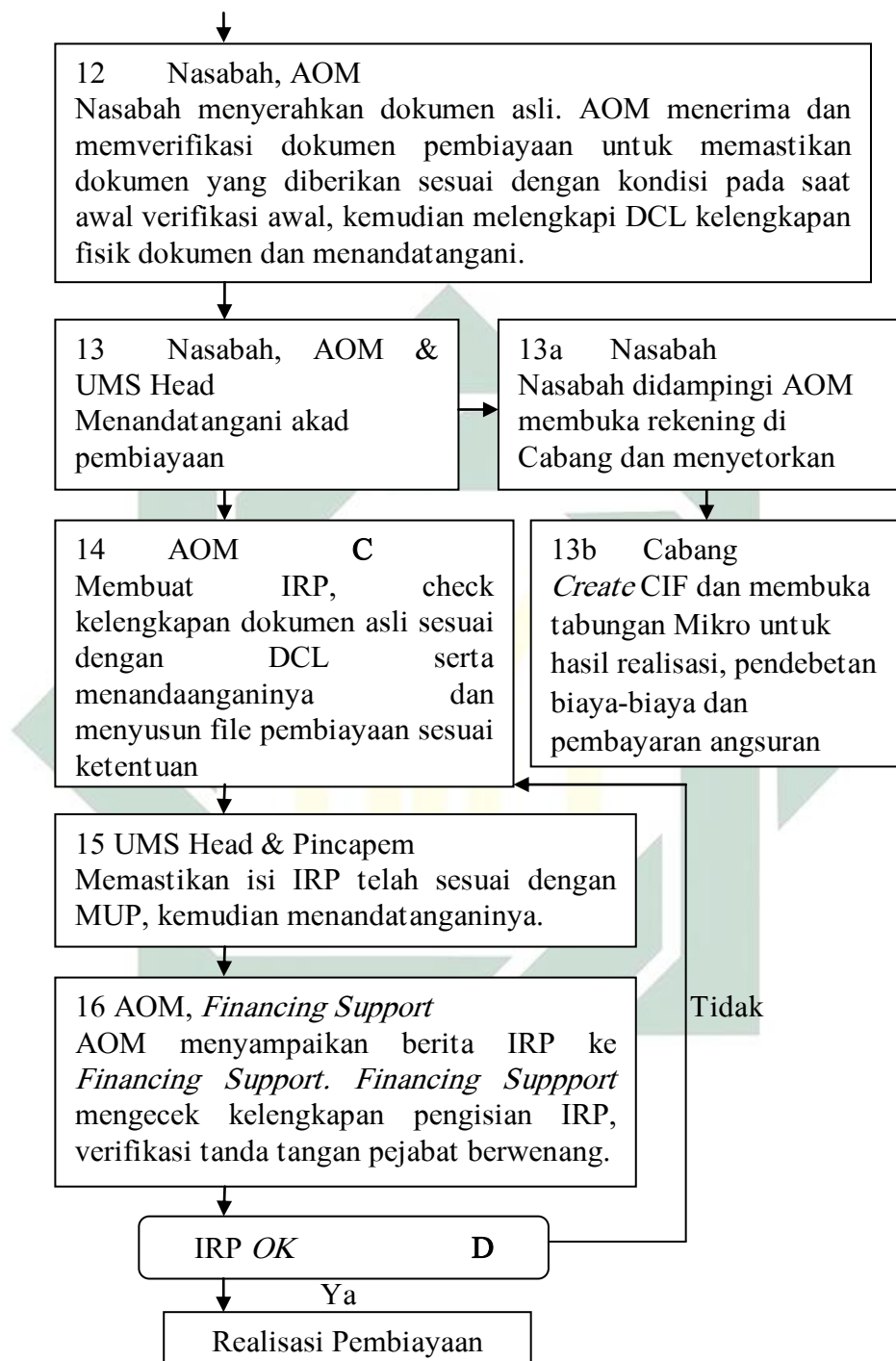
## 7.) Tahap Pemantauan/ *Monitoring*

<sup>145</sup> Amun, AOM Babat, *Wawancara*, Lamongan, 13 Desember 2017.









Keterangan:

UH/UMS Head : *Unit Micro Syariah Head*  
 Pincapem : *Pimpinan Cabang Pembantu*  
 AOM : *Account Officer Micro*  
 UMS : *Unit Mikro Syariah*  
 DCL : *Document Check List*

LKN : Laporan Kunjungan Nasabah  
MUP : Memorandum Usulan Pembiayaan  
IRP : Intruksi Realisasi Pembiayaan  
Sumber: BRI Syariah KCP Lamongan, 2017.

#### 4. Kendala Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro Syariah

“Kendala seperti pembiayaan bermasalah kredit macet di BRI Syariah KCP Lamongan selama ini untuk penyaluran KUR Mikro tidak ada, tidak tahu kalau di kantor cabang lain.”<sup>147</sup>

“Kendala dalam penyaluran KUR Mikro Syariah biasanya ini, rata-rata sudah punya pinjaman di bank lain, katakanlah ada nasabah pengajuan terus di Bank *Checking*-nya itu ada pinjaman status modal kerja itu ga bisa diproses. Kalau secara garis besarnya ga ada soalnya ini kan pemasarannya tergolong mudah soalnya marginnya murah.”<sup>148</sup>

“Kendala yang signifikan ga ada, paling kendalanya pada saat calon nasabah pengajuan itu beliau sudah mempunyai fasilitas pembiayaan di bank lain.”<sup>149</sup>

“Kendalanya ketika diinput di BI *Checking*, nama calon nasabah terdaftar dalam kol yang telat bayar angsuran atau kena *blacklist*”<sup>150</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut ditemukan kendala dalam penyaluran Pembiayaan KUR Mikro Syariah yaitu calon nasabah yang mengajukan Pembiayaan KUR Mikro sudah memiliki fasilitas pembiayaan di bank lain dengan tujuan modal kerja dan riwayat pembiayaan nasabah yang pernah ada masalah, baik karena kemacetan atau keterlambatan bayar sehingga proses tidak dapat dilanjutkan. Tidak ditemukan pembiayaan bermasalah dalam Pembiayaan KUR Mikro Syariah di BRI Syariah KCP Lamongan.

<sup>147</sup> Ibid.

<sup>148</sup> Amun, AOM Babat, *Wawancara*, Lamongan, 13 Desember 2017.

<sup>149</sup> Dias, UMS Head Babat, *Wawancara*, Lamongan, 13 Desember 2017.

<sup>150</sup> Fariz, AOM Paciran, *Wawancara*, Lamongan, 12 Desember 2017.



“Nggih peningkatan usaha, maune iku saben tok, ndang terus hasile saben dados ngeten-ngeten niki usaha mebel. Satu bulan setelah pencairan, dilihat usahanya berkembang apa ndak, uangnya itu dibuat apa aja, trus ya liat usaha meubel ini juga, maksudnya itu ga dibuat pertanian aja, soalnya pertanian kan musiman, kalau dibuat itu aja kan ga bisa ngembang. Kalau ada longgar sebulan sekali Petugas BRI Syariah KCP Lamongan mesti ke sini, mampir ngasih saran buat masarin ngembangin produksi ini.”<sup>155</sup>

“Dengan mendapatkan Pembiayaan KUR Mikro Syariah ini bisa meningkatkan omzet pedapatan saya, semula tanaman itu-itujaja, sekarang bervariasi, saya bisa kulakan, stok tanaman hias bertambah dan pembeli banyak datang ke sini karena banyak pilihannya. Dari omzet yang meningkat saya bisa beli mobil colt bak.”<sup>156</sup>

“Saya bisa beli mesin bordir, nambah mesin jahit, beli kain sehingga produksi bisa bertambah, omzet pendapat meningkat.”<sup>157</sup>

“Awale damel tumbas kebutuhan pertanian, nggih sing wayahe pari nggih diiciri pari, wayahe ulam nggih diiciri ulam, kale sakniki saget usaha agen elpiji, ngirim nang toko-toko.”<sup>158</sup>

“Biaya modal-modal nek ga onok lak, iso modal ngono mbak semenjak oleh KUR Mikro Syariah, kita butuh bibit ndak ada modal, pinjem. Jenenge tambak kan ndok njero banyu, kadang lek dikei apik yo apik, kadang diparingi lek ga metu yo ga metu, lang piye butuh modal yo ngambil pembiayaan ben berjalan. Alhamdulillah usaha bisa berjalan saget rutin bayar angsuran.”<sup>159</sup>

“Nggih ngalami peningkatan, perikanan udang panami ini bulanan, berkembang banyak. Ditambah lagi bisa usaha ternak burung.”<sup>160</sup>

<sup>155</sup> Bu Mi, Nasabah KUR Mikro Syariah Sektor Pertanian, *Wawancara*. Lamongan, 30 Januari 2018.

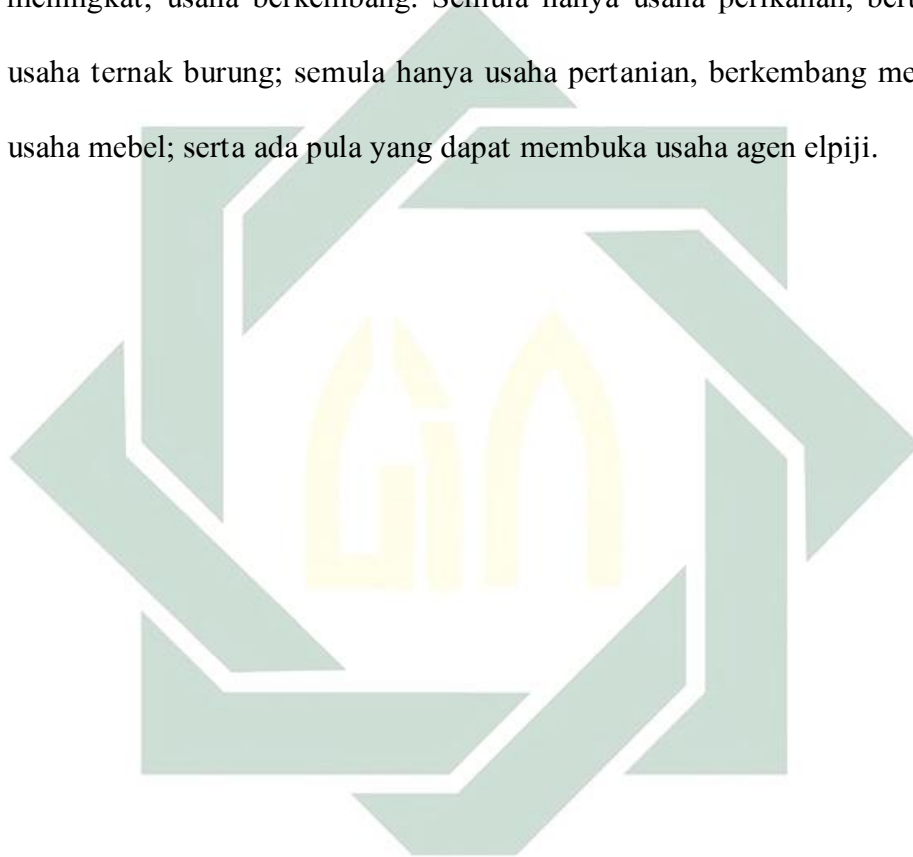
<sup>156</sup> Pak Ben, Nasabah KUR Mikro Syariah Sektor Perdagangan, *Wawancara*, Lamongan, 30 Januari 2018.

<sup>157</sup> Bu Hayati, Nasabah KUR Mikro Syariah Sektor Jasa, *Wawancara*, Lamongan, 30 Januari 2018.

<sup>158</sup> Bu Fa, Nasabah KUR Mikro Syariah Sektor Pertanian, *Wawancara*. Lamongan, 30 Januari 2018.

<sup>159</sup> Bu Sul, Nasabah KUR Mikro Syariah Sektor Perikanan, *Wawancara*. Lamongan, 30 Januari 2018.

<sup>160</sup> Pak Mus, Nasabah KUR Mikro Syariah Sektor Perikanan, *Wawancara*. Lamongan, 30 Januari 2018.









Syariah tersebut.<sup>162</sup> Dalam hal ini berarti sumber dana Pembiayaan KUR Mikro Syariah berasal dari BRI Syariah sebagai penyalur. Dari hasil wawancara kepada petugas BRI Syariah Lamongan, sebagian besar petugas memahami, namun terdapat dua orang petugas yang menyatakan bahwa pendanaan Pembiayaan KUR Mikro Syariah berasal dari Pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum terbentuknya persepsi yang sama di antara petugas BRI Syariah KCP Lamongan terkait sumber dana Pembiayaan KUR Mikro Syariah.

### 3. Prosedur Pembiayaan KUR Mikro Syariah

Benar adanya bahwa kebijakan dan prosedur yang jelas diperlukan dalam pengelolaan pembiayaan. Menurut Ikatan Bankir Indonesia dalam bukunya yang berjudul *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, kebijakan dan prosedur pembiayaan meliputi proses analisis, persetujuan, pencairan, pemantauan, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.<sup>163</sup> Jika dianalisis, prosedur pemberian Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan sudah jelas memuat hal tersebut. Prosedur pemberian Pembiayaan KUR Mikro Syariah dilakukan dalam 7 (tujuh) tahap, yaitu sebagai berikut:

### 1.) Tahap Pengajuan Pembiayaan

Pada tahap ini bank hanya memberikan Pembiayaan KUR Mikro Syariah apabila permohonan pembiayaan yang dilakukan

<sup>162</sup> Ibid.

<sup>163</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan...*, 4.

Dalam hal pengajuan permohonan Pembiayaan KUR Mikro Syariah, calon nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dilihat dari persyaratan dokumen yang tertera pada brosur BRI Syariah terkait persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah Pembiayaan KUR Mikro Syariah dan penerapannya di BRI Syariah KCP Lamongan terdapat sedikit perbedaan. Pihak BRI Syariah KCP Lamongan menambahkan beberapa persyaratan pada calon nasabah, administrasi, dan agunan, diantaranya sebagai berikut:

Keterangan	Persyaratan pada Brosur	Penambahan
<b>Calon</b>	Individu (perorangan) yang	Individu (perorangan)

[illegible]

<b>Nasabah</b>	melakukan usaha produktif dan layak.	minimal usia 21 tahun/telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun yang melakukan usaha produktif dan layak. Tempat usaha radius area 5 km dari UMS.
<b>Administrasi</b>	Identitas berupa E-KTP, Kartu Keluarga, dan surat ijin usaha.	Buku Nikah.
<b>Agunan</b>	3. Pokok: Baik untuk KUR Mikro Syariah Modal Kerja maupun KUR Mikro Syariah Investasi adalah usaha atau tempat usaha yang dibiayai.  4. Tambahan: Tidak wajib.	Titip jaminan seperti BPKB Kendaraan, SHM tempat usaha.

Pihak BRI Syariah menambahkan syarat rentang usia minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun, serta maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan supaya persyaratan lebih jelas dan tepat sasaran. Adanya persyaratan buku nikah guna membuktikan bahwa calon nasabah benar telah menikah. Hal ini untuk menghindari adanya manipulasi data. Pada saat wawancara terdapat seorang nasabah yang mengaku lama dalam proses pembiayaan dikarenakan adanya perbedaan tanggal lahir antara yang tertera di E-KTP dengan yang tertera di Buku Nikah, sehingga hal ini harus di-investigasi dahulu kepada KUA. Hasilnya memang terdapat kesalahan cetak jadi tidak dipermasalahkan dan proses tetap bisa dilanjutkan.

Untuk persyaratan usaha radius area 5 km dari UMS dimaksudkan agar usaha nantinya dapat dengan mudah dilakukan *monitoring*. Diketahui bahwa agunan pokok dari Pembiayaan KUR Mikro Syariah adalah usaha atau tempat usaha yang dibiayai, sedangkan agunan tambahannya tidak wajib. Pihak BRI Syariah meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain usaha atau tempat usaha yang dibiayai, namun tanpa pengikatan, hanya sebagai titipan agunan. Agunan sangat menentukan tingkat keamanan pembiayaan yang disalurkan BRI Syariah KCP Lamongan. Adanya titipan agunan bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi

## 2.) Tahap BI *Checking*

Pada tahap ini Petugas BRI Syariah KCP Lamongan melakukan BI *Checking* melalui Sistem Informasi Debitur (SID) kepada Bank Indonesia (BI). Hal ini telah sesuai dengan peraturan KUR pada BAB III Pasal 16 tentang Penyaluran KUR bahwasannya penyalur KUR Mikro wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.<sup>164</sup> Apabila tersedia dukungan sistem informasi yang lengkap mengenai profil dan kondisi nasabah, terutama nasabah yang sebelumnya telah mendapatkan fasilitas pembiayaan, maka kelancaran proses pembiayaan dan penerapan manajemen risiko pembiayaan yang efektif dan ketersediaan informasi kualitas nasabah dapat dicapai. Sistem informasi tersebut pun dapat mendukung percepatan proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian pembiayaan

### 3.) Tahap Survei

Tahap survei yang dilakukan oleh petugas BRI Syariah KCP Lamongan dengan cara mengunjungi langsung ke tempat usaha nasabah berguna untuk mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk proses selanjutnya, yakni analisis pembiayaan. Pada

[illegible]



#### 4.) Tahap Analisis Pembiayaan

Analisis terhadap informasi hasil survei Pembiayaan KUR Mikro Syariah lebih kompleks. Hal ini berguna untuk melihat potret nasabah dan usahannya secara utuh apakah layak untuk diberi Pembiayaan KUR Mikro Syariah. Menilai kelayakan jumlah permohonan pembiayaan dengan kegiatan usaha yang dibiayai. Petugas BRI Syariah KCP Lamongan memastikan bahwa Pembiayaan KUR Mikro Syariah yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah membayar kembali. Hal ini memastikan bahwa pemberian Pembiayaan KUR Mikro Syariah terjaga dari sisi kualitas pembiayaan dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya praktik *mark up* yang dapat merugikan BRI Syariah.

Pada tahap analisis ini *Account Officer Micro* (AOM) BRI Syariah KCP Lamongan telah melakukan dengan prinsip kehati-hatian. Menilai pembiayaan dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan benar sehingga dapat menghasilkan Pembiayaan KUR Mikro Syariah yang sehat, berkualitas, serta nasabah yang amanah. Hal ini

Tahap pemberian putusan pembiayaan biasa juga disebut tahap persetujuan pembiayaan. Pada BRI Syariah KCP Lamongan, pengambil keputusan usulan Pembiayaan KUR Mikro Syariah adalah Unit Mikro Syariah Head (UH). AOM menginformasikan kepada nasabah untuk memastikan konfirmasi persetujuan nasabah pembiayaan, yang kemudian menjadi dasar untuk menandatangani perjanjian Pembiayaan KUR Mikro Syariah.

Dalam tahap pencairan ini dilakukan perjanjian Pembiayaan KUR Mikro Syariah dengan jenis akad yang disepakati, pada BRI Syariah KCP Lamongan dalam penyalurannya menggunakan akad *murabahah bil wakalah*. Akad *murabahah bil wakalah* ini sering diterapkan dalam pembiayaan pada bank syariah. Adanya akad *wakalah* yang mendampingi *murabahah* ini untuk mencegah terjadinya kerusakan atau penyalahgunaan akad, yang merupakan perjanjian khusus yang diadakan pihak bank dengan nasabah karena bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang.

[illegible]

## 7.) Tahap *Monitoring*

Jika diartikan, *monitoring* berarti pemantauan, pengawasan. Dalam proses pembiayaan, *monitoring* merupakan salah satu aktivitas penting. Hal ini untuk mengetahui dan memonitor perkembangan pembiayaan, perjalanan pembiayaan, serta perkembangan usaha nasabah sejak Pembiayaan KUR Mikro Syariah diberikan sampai lunas. Seperti yang diketahui dari hasil wawancara dan observasi bahwa Petugas BRI Syariah KCP Lamongan telah melakukan *monitoring* pada nasabah KUR Mikro Syariah dimulai saat pembiayaan berjalan 3 bulan setelah pencairan.

[illegible]

#### 4. Kendala Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro Syariah

[illegible]

Melalui Pembiayaan KUR Mikro Syariah ini, masalah kekurangan permodalan dalam usaha mikro dapat teratasi. Seperti yang kita ketahui bahwa modal merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan usaha. Modal pinjaman dari bank tidak lagi sulit diperoleh, *margin* Pembiayaan KUR Mikro Syariah yang rendah, prosedur yang relatif sederhana, wujud bank lebih memihak pada kepentingan pelaku usaha dengan tujuan mensejahterakan.

[illegible]

Adanya ketentuan mengenai agunan yang menjadi persyaratan, bukan lagi menjadi hambatan terbesar bagi usaha mikro karena dalam Pembiayaan KUR Mikro Syariah, agunan bersifat tidak wajib dan tanpa pengikatan. Meskipun ada titipan jaminan berupa BPKB Kendaraan, jika diamati dari wawancara, nasabah tidak merasa terbebani. Dengan dukungan Lembaga Penjaminan Pembiayaan dapat mengoptimalkan pemberian Pembiayaan KUR Mikro Syariah kepada sektor usaha mikro, BRI Syariah tidak ragu dalam menyalurkan pembiayaannya.

Hal ini menunjukkan bahwa Pembiayaan KUR Mikro Syariah sangat berperan dalam pengembangan usaha mikro. Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan dapat membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, omzet usaha meningkat, serta dapat mengembangkan usaha nasabah lebih dari satu jenis. Seperti pengakuan dalam hasil penelitian nasabah penerima Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan yang merupakan pelaku usaha mikro, merasakan bahwa sejak mendapatkan pembiayaan beliau dapat menjalankan usaha, usahanya di sektor perikanan udang panami yang semula tidak ada modal kini dapat membeli bibit ikan.

Pelaku usaha mikro setelah mendapatkan Pembiayaan KUR Mikro Syariah modal kerja pada sektor jasa jahit, dapat membeli barang atau aset seperti mesin jahit, bordir, dan kain. Dengan bertambahnya aset dapat meningkatkan omzet pendapatan membantu perputaran usaha, perputaran usaha pelaku mikro menjadi lancar. Pada sektor perdagangan, pelaku usaha

tanaman hias mengalami pengembangan, dengan mendapatkan Pembiayaan KUR Mikro Syariah, ia dapat menambah persediaan barang, membeli tanaman langsung dari penyuplai dimana tagihan *supplier* lebih cepat dibandingkan pembayaran dari *customer*. Hal ini sangat membantunya dalam menjalankan usaha, *customer* banyak datang membeli karena pilihan tanaman yang banyak. Dengan itu omzet pendapatannya meningkat, sehingga dapat juga menambah aset berupa mobil colt bak yang dapat memperlancar usahanya.

Di sisi lain, terdapat beberapa pelaku usaha yang dengan mendapatkan Pembiayaan KUR Mikro Syariah, ia dapat mengembangkan usahanya lebih dari satu jenis. Pelaku usaha sektor perikanan misalnya, semula ia hanya usaha di bidang perikanan saja, namun sekarang berkembang menjadi usaha agen elpiji yang dapat sukses mengirim ke toko-toko. Ada juga yang berkembang membuka usaha ternak burung. Lalu pada sektor pertanian mulanya, kini dapat membuka usaha lain berupa usaha mebel.

Jika dianalisis, Pembiayaan KUR Mikro Syariah ini sudah tepat sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan. Seperti tujuannya yaitu meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada sektor produktif, mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro kecil dan menengah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta menanggulangi kemiskinan.





**BAB V**  
**PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. BRI Syariah KCP Lamongan menyalurkan Pembiayaan KUR Mikro Syariah fokus pada usaha mikro sektor perikanan, sektor peternakan, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor jasa produksi, dan sektor perdagangan. Prosedur/Proses Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: tahap pengajuan pembiayaan, tahap *BI Checking*, tahap survei, tahap analisis pembiayaan, tahap pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan/akad pembiayaan, tahap *monitoring*, disertai pertimbangan kaidah syariah. Implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KCP Lamongan berjalan dengan baik dan tidak ditemukan adanya pembiayaan macet, dilaksanakan secara tepat sasaran sehingga mampu memecahkan permasalahan dengan baik.
2. Pembiayaan KUR Mikro Syariah mengatasi masalah pemodalán yang merupakan faktor utama dalam mengembangkan usaha, berperan membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, omzet usaha meningkat, serta dapat mengembangkan usaha nasabah lebih dari satu jenis. Kantor layanan BRI Syariah KCP Lamongan yang mampu menjangkau pelosok Kabupaten Lamongan, memiliki jumlah *Account*

Adapun saran setelah dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- [illegible]

## DAFTAR PUSTAKA

- Academia, “Ada Beberapa Definisi Pengembangan Usaha Menurut Para Ahli”, diakses dari [http://www.academia.edu/8665059/Ada\\_beberapa\\_definisi\\_pengembang an\\_usaha\\_menurut\\_para\\_ahli](http://www.academia.edu/8665059/Ada_beberapa_definisi_pengembang_an_usaha_menurut_para_ahli), pada tanggal 5 April 2018.
- Amin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1999.
- Amun, AOM Babat, *Wawancara*, Lamongan, 13 Desember 2017.
- Anggraini, Dewi dan Nasution, Syahrir Hakim. “Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 1, No. 3, Februari 2013, diakses dari [https://www.neliti.com/journals/jurnal-ekonomi-dan-keuangan?per\\_page=10&page=10](https://www.neliti.com/journals/jurnal-ekonomi-dan-keuangan?per_page=10&page=10), pada tanggal 11 Oktober 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi’i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, *Usaha Mikro Kecil*, diakses dari <https://lamongankab.bps.go.id/Subjek/view.35subjekViewTablaccordo n-daftar-subjek2q>, pada tanggal 10 September 2017.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik UMKM tahun 2012 – 2013*, diakses dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) pada tanggal 19 September 2017.
- Berlian, *Branch Operation Supervisor*, *Wawancara*, Lamongan. 12 Desember 2017.
- Bibah, AOM Paciran, *Wawancara*, Lamongan, 12 Desember 2017.
- BRISyariah, “Sejarah BRISyariah”, diakses dari [http://www.brisyariah.co.id/tentang\\_kami.php?f=sejarah](http://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah), pada tanggal 25 Desember 2017.
- BRISyariah, “Visi dan Misi”, diakses dari [http://www.brisyariah.co.id/tentang\\_kami.php?f=visimisi](http://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=visimisi), pada tanggal 25 Desember 2017.



Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM. “Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah”. Brosur.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, *Brosur KUR Syariah*.

Kredit Usaha Rakyat, “Data Realisasi KUR”, diakses dari [http://kur.ekon.go.id/realisasi\\_kur/2017/10](http://kur.ekon.go.id/realisasi_kur/2017/10), pada tanggal 16 September 2017.

Kredit Usaha Rakyat, “KUR Baru Memperluas Akses Pembiayaan Bagi UMKM”, diakses dari <http://kur.ekon.go.id/kur-baru-memperluas-akses-pembiayaan-bagi-umkm>, pada tanggal 16 September 2017.

Kwartono, M. *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: Andi Offset, 2007.

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia. *Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Jakarta: E-Book, 2015.

LPPI dan BI. *Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: E-Book, 2015.

Maesya, Akbar Agung. “Implementasi Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak”. Skripsi – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015.







